

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 110

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 14 NOVEMBER 2019
NOMOR : 110 TAHUN 2019
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 198 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali.....

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3APM adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
5. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

9. Kesetaraan.....

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol, terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Metode Alur Kerja Analisis Gender atau *Gender Analysis Pathway* adalah alat analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender.
15. Pernyataan.....

15. Pernyataan Anggaran Gender atau *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat PAG atau GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran atau *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran atau *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang PUG.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD PUG Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB III.....

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud pengaturan RAD PUG Tahun 2018-2023 adalah:

- a. memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. acuan dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah; dan
- c. acuan dalam menyusun RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Tujuan pengaturan RAD PUG Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG pada Tahun 2018 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RAD PUG Tahun 2018-2023, meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan dan PUG;
 - b. sosialisasi PUG;
 - c. implemmentasi perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender; dan
 - d. optimalisasi pelaksanaan pemantauan PUG.
- (2) RAD PUG Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolok ukur pencapaian PUG Tahun 2018-2023.

BAB IV.....

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. rencana aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. penanggung jawab yang memuat Perangkat Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. instansi terkait yang memuat instansi yang mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. kriteria keberhasilan yang memuat keluaran atau *output* yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran atau *output* yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. ukuran keberhasilan yang memuat keluaran atau *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - g. persentase.....

- g. persentase capaian, yang memuat persentase capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi; dan
 - h. keterangan yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksana aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam matrik rencana aksi Daerah PUG yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Bappeda dan Dinas P2KBP3APM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018-2023.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Wali Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi.
pada tanggal 14 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 14 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

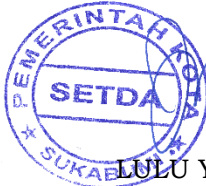
ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 110 TAHUN 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

 RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (RAD PUG) KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 – 2023

No	Bidang	Program	Rencana Aksi	Pelaksana	Indikator Output	Tahun Pelaksanaan					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Penyerasian/ Pengintegrasian peraturan perundang- undangan	Implementasi peraturan perundangan	Melakukan advokasi kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif ttg implementasi peraturan perundangan- undangan	Bappeda DP2KBP3APM Bagian Hukum LSM Ormas Media PT	Terbitnya Perda, Perwal, SK Wali Kota tentang Implementasi PUG	v	v		v	v	v
		Peningkatan KIE PUG	Optimalisasi sosialisasi/ advokasi PUG	Bappeda DP2KBP3APM PT	Seminar, lokakarya, workshop, diskusi publik, buku/leaflet/booklet		v			v	v
II	Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender	Peningkatan koordinasi dan kewenangan kelembagaan PUG	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender	Bappeda DP2KBP3APM	Adanya Focal Point di Perangkat Daerah dan Pokja PUG	v		v	v	v	v
		Peningkatan kinerja antar kelembagaan PUG	Pengembangan dan penguatan jenjang kelembagaan PUG	Wali Kota	Adanya kebijakan dan sistem implementasi PUG		v	v		v	
		Penyusunan anggaran yang responsif Gender	Menyusun anggaran yang responsif Gender	Perangkat Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Program atau kegiatan yang responsif Gender di Perangkat Daerah	v	v	v	v	v	v

Peningkatan....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan PUG	Pelatihan atau <i>training of trainer</i> bagi Perangkat Daerah pada kelembagaan PUG	Bappeda BPKD DP2KBP3APM Perangkat Daerah	Sumber daya manusia paham dan mampu melakukan analisis Gender di Perangkat Daerah		v	v	v	v	v
			Menyebarkan panduan teknis pelaksanaan PUG	Bappeda BPKD DP2KBP3APM	Panduan teknis perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender	v		v		v	
		Penyusunan sistem data dan informasi Gender	Menyusun sistem data dan informasi Gender	BPS DP2KBP3APM Perangkat Daerah	Sistem data dan informasi Gender		v	v			v
III	Percepatan kebijakan, program, atau kegiatan yang responsif Gender	Pengintegrasian PUG dalam dokumen perencanaan di Perangkat Daerah	Menggunakan data terpilah Gender dan profil Gender dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Bappeda DP2KBP3APM Perangkat Daerah	RPJMN, RPJMND, dan Renstra, serta DPA Perangkat Daerah yang responsif Gender		v				v
1	Optimalisasi monitoring dan evaluasi program atau kegiatan yang responsif Gender	Menyusun sistem pelaporan tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	Mengintegrasikan dimensi Gender dalam sistem pelaporan yang telah ada di Perangkat Daerah	Bappeda DP2KBP3APM Perangkat Daerah Independen	Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci	v	v	v	v	v	v
2	Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG	Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan PUG	Memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan PUG di masyarakat	DP2KBP3APM Perangkat Daerah (LSM, PT, Ormas) Media	Tokoh agama, tokoh adat, aktivis pemuda, dan perempuan mampu menjadi fasilitator PUG		v		v		v
IV	Penyelenggaraan PUG										
1	Penguatan komitmen (dukungan politik)	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Penggalangan dukungan politik melalui dialog antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif	Setda Bappeda DP2KBP3APM	Terbitnya Perda tentang PUG di Kota Sukabumi		v	v			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengusulan Perda PUG	DP2KBP3APM	Rancangan Perda PUG		v				
			Sosialisasi Perda PUG	Bappeda DP2KBP3APM Pokja PUG	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perda PUG			v	v		
2	Penigkatan kebijakan pembangunan responsif Gender	Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan	Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG	Bappeda	Adanya indikator kinerja pencapaian PUG		v	v		v	v
			Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan	Bappeda DP2KBP3APM Pokja PUG	Adanya panduan teknis pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah, kecamatan, dan kelurahan						
			Fasilitasi dan pendampingan penyusunan anggaran responsif Gender di 33 perangkat Daerah secara bertahap	DP2KBP3APM Bappeda Pokja PUG	Dokumen anggaran responsif Gender di 38 Perangkat Daerah secara bertahap 5 (lima) tahun	v	v	v	v	v	v
3	Pengembangan kelembagaan PUG	Program penguatan kelembagaan PUG dan anak	Fasilitasi pengembangan P2TP2A	DP2KBP3APM	Meningkatnya pemahaman pengelola P2TP2A	v	v	v	v	v	v
			Penyusunan pedoman mekanisme kerja Pokja PUG dan focal point PUG	DP2KBP3APM Bappeda	Produk pedoman mekanisme kerja Pokja PUG dan focal point PUG		v		v		v
			Pelaksanaan Koordinasi Pokja PUG	DP2KBP3APM Bappeda	Meningkatnya kinerja Pokja PUG	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan monev kinerja Pokja PUG dan <i>focal point</i> PUG	DP2KBP3APM Bappeda	Dokumen Renja Pokja PUG dan SKPD	v	v	v	v	v	v
			Penguatan jejaring kelembagaan PUG	DP2KBP3APM Bappeda	Meningkatnya kelembagaan PUG	v	v	v	V	V	V
			Penyelenggaraan atau Pembentukan Forum PUG kelurahan	DP2KBP3APM Bappeda	Terbentuknya forum PUG kelurahan beranggotakan sekretaris kelurahan(laki-laki dan perempuan)		v	V			
4.	Peningkatan kapasitas SDM	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pelatihan dan Pendampingan PPRG bagi SKPD (Pokja PUG)	DP2KBP3APM	Meningkatnya pemahaman dan Dokumen PPRG	v	v	v	V	V	V
			Pelatihan dan Pendampingan PPRG bagi <i>focal point</i>	DP2KBP3APM	Meningkatnya pemahaman dan Dokumen PPRG		v	v	V	V	V
			Pelatihan PPRG bagi sekretaris kelurahan dan kader masyarakat (laki-laki dan perempuan)	DP2KBP3APM	Meningkatnya pemahaman PUG bagi sekretaris kelurahan dan kader masyarakat			v			V
5.	Pengembangan sistem dan informasi gender	Program Keserasian kebijakan kualitas hidup perempuan dan anak	Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender dan anak tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan	Bappeda DP2KBP3APM BPS	Adanya dokumen pedoman pengumpulan data pilah Gender dan anak	v	v	v	V	V	V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengembangan SIM Gender dan anak	Bappeda DP2KBP3APM BPS Pokja PUG	Adanya SIM Gender dan anak		v		v		v	
			Diseminasi pedoman pengumpulan data pilah gender dan anak	DP2KBP3APM	Meningkatnya pemahaman pengumpulan data pilah gender dan anak	v	v	v	v	v	v	
			Program pengembangan data, informasi, dan statistik daerah	Pengumpulan data (survei sosial ekonomi nasional dan survei angkatan kerja nasional) berbasis gender	BPS	Tersedianya dokumen data terpilah bersumber dari Susenas dan Sakernas	v	v	v	v	v	v
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial	Diskominfo	Meningkatnya peran serta lembaga komunikasi sosial dalam mendorong kesetaraan gender dan perlindungan anak	v	v	v	v	v	v
6.	Peningkatan analisis gender	Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Penyusunan profil gender dan anak tingkat kota	BAPPEDA DP2KBP3APM BPS	Dokumen pendataan pembangunan manusia berbasis gender	v	v	v	v	v	v	
			Diseminasi buku profil gender dan anak	DP2KBP3APM	Meningkatnya pemahaman profil gender dan anak		v	v		v	v	
			Penyusunan Analisis Situasi Ibu dan Anak	DP2KBP3APM	Dokumen pendataan kualitas hidup ibu dan anak		v	v		v		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	Penyelesaian isu strategis gender										
1	Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan (PSDK)	Penyediaan media penyuluhan (cetak dan elektronik) kesehatan yang mempromosikan upaya peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan	Dinas Kesehatan	Adanya promosi upaya peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan melalui media penyuluhan	v	v	v	v	v	v
			Penyuluhan kesehatan tentang peningkatan kualitas hidup laki-laki dan perempuan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan	Meningkatnya pemahaman masyarakat (terutama laki-laki) tentang kualitas hidup laki-laki dan perempuan	v	v	v	v	v	v
		Program bina kesehatan masyarakat	Fasilitasi dan pelatihan geriatri (laki-laki dan perempuan) bagi petugas (laki-laki dan perempuan) kesehatan puskesmas santun lansia	Dinas Kesehatan	Meningkatnya keterampilan petugas (laki-laki dan perempuan) kesehatan puskesmas santun lansia dalam pelayanan kesehatan lansia	v	v	v	v	v	v
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Pengembangan Kemitraan paraji untuk persalinan di Puskesmas Poned	Dinas Kesehatan	Meningkatnya jumlah petugas kesehatan (termasuk paraji) yang terampil	v	v	v	v	v	v
			Penyuluhan tentang pentingnya Imunisasi Tetanus dan Tablet FE3 bagi Ibu hamil	Dinas Kesehatan	Meningkatnya pemahaman keluarga ibu hamil tentang pentingnya Imunisasi Tetanus dan Tablet FE3 bagi Ibu hamil	v	v	v	v	v	v

Penyuluhan.....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyuluhan kesehatan tentang keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat (terutama kepala keluarga dan tokoh masyarakat) tentang keselamatan ibu melahirkan dan anak	v	v	v	V	V	V
			Pelatihan peningkatan kemampuan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi petugas puskesmas (laki-laki dan perempuan)	Dinas Kesehatan	Meningkatnya kemampuan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi petugas kesehatan (laki-laki dan perempuan) di puskesmas	v	v	v	V	V	V
			Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi remaja bagi anak sekolah (SMP dan SMA laki-laki dan perempuan)	Dinas Kesehatan	Meningkatnya pemahaman anak sekolah (SMP dan SMA laki-laki dan perempuan) tentang kesehatan reproduksi remaja	v	v	v	V	V	V
			Penyuluhan tentang kesehatan ibu hamil bagi ibu bekerja di perusahaan	Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya pemahaman ibu bekerja di perusahaan tentang kesehatan ibu hamil	v	v	v	V	V	V
		Program perbaikan gizi masyarakat	Pengadaan makanan tambahan dan vitamin bagi balita	Dinas Kesehatan	Penurunan jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk	v	v	v	V	V	V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Penyuluhan kepada kader masyarakat untuk penanggulangan balita gizi buruk	Dinas Kesehatan	Meningkatnya pemahaman kader masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk penanggulangan balita gizi buruk	v	v	v	v	v	v	
			Penyuluhan pada masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinsosnakertrans	Meningkatnya pemahaman masyarakat (kader, anak sekolah, pekerja, kepala keluarga) tentang bahaya HIV/AIDS	v	v	v	v	v	v	v
			Pelatihan petugas kesehatan masyarakat untuk penanganan orang dengan HIV Aids (ODHA)	Dinas Kesehatan	Meningkatnya keterampilan petugas kesehatan masyarakat untuk penanganan ODHA	v	v	v	v	v	v	v
2.	Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan PAUD untuk anak laki-laki dan perempuan	Dinas Pendidikan	Meningkatnya jumlah anak (laki-laki dan perempuan) usia dini yang ikut PAUD	v	v	v	v	v	v	
		Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Penyediaan dana beasiswa bagi siswa miskin tingkat SMP baik laki-laki dan perempuan	Dinas Pendidikan	Menurunnya jumlah angka putus sekolah siswa SD dan SMP (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v	v
			Penyuluhan tentang wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun	Dinas Pendidikan	Meningkatnya pemahaman masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun	v	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kampanye pemberian motivasi kepada anak SMP (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan sekolah	Dinas Pendidikan	Penurunan jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) putus sekolah	v	v	v	v	v	v
			Penyediaan BUS sekolah bagi siswa (laki-laki dan perempuan) yang aksesnya jauh dari sekolah	Dinas Perhubungan Dinas Pendidikan	Meningkatnya akses siswa (laki-laki dan perempuan) ke sekolah	v			v		
		Program pendidikan menengah	Penyediaan dana beasiswa bagi siswa miskin tingkat SMA (laki-laki dan perempuan)	Dinas Pendidikan	Menurunnya jumlah angka putus sekolah siswa SMA laki-laki dan perempuan	v	v	v	v	v	v
			Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas	Dinas Pendidikan	Meningkatnya daya tampung untuk siswa (laki-laki dan perempuan) SMA	v	v	v	v	v	v
			Penyelenggaraan SMA terbuka	Dinas Pendidikan	Meningkatnya daya tampung untuk siswa (laki-laki dan perempuan) SMA	v	v	v			
			Kampanye pemberian motivasi kepada anak SMA (laki-laki dan perempuan) untuk melanjutkan sekolah	Dinas Pendidikan dan KCD	Menurunnya jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) putus sekolah	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program pendidikan non formal	Penyelenggaraan keaksaraan fungsional bagi warga buta aksara (laki-laki dan perempuan) di tingkat kelurahan dan tempat kerja	Dinas Pendidikan	Meningkatnya jumlah warga melek huruf (khususnya perempuan)	v	v				
			Penyelenggaraan keaksaraan fungsional di lokasi terdekat dengan kelompok sasaran (laki-laki dan perempuan)	Dinas Pendidikan	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur pendidikan di masyarakat berlokasi dekat kelompok sasaran (laki dan perempuan)	v	v				
			Penyelenggaraan keaksaraan usaha mandiri (KUM)	Dinas Pendidikan	Meningkatnya jumlah warga yang memiliki usaha mandiri (khususnya perempuan)		v	v		V	V
			Kejar paket A setara SD bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan)	Dinas Pendidikan	Meningkatnya jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti paket A setara SD	v	v	v	V	V	V
			Kejar paket B setara SMP bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan)	Dinas Pendidikan	Meningkatnya jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti paket B setara SMP	v	v	v	V	V	V
			Kejar paket C setara SMA bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan)	Dinas Pendidikan KCD	Meningkatnya jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti paket C setara SMA	v	v	v	V	V	V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Fasilitasi penyelenggaraan paket C kejuruan setara SMK bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan)	Dinas Pendidikan KCD	Meningkatnya jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) yang mengikuti paket C kejuruan setara SMK	v	v	v			
			Penyuluhan tentang tertib lalulintas bagi siswa sekolah SD, SMP, SMA (laki-laki dan perempuan)	Dinas Perhubungan	Meningkatnya pemahaman tentang tertib lalulintas bagi siswa sekolah SD, SMP, SMA (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
			Penyuluhan tentang tertib lalulintas bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan)	Dinas Perhubungan	Meningkatnya pemahaman tentang tertib lalulintas bagi masyarakat (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
3.	Ketenagakerjaan	Program peningkatan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya (utamanya bagi laki-laki)	Disnaker	Meningkatnya kesempatan kerja bagi laki-laki tidak sekolah dan lulusan SD	v	v	v			
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai pada perusahaan (bagi laki-laki maupun perempuan)	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan beragam jenjang pendidikan	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembentukan pelopor pencipta lapangan kerja kelurahan (bagi laki-laki maupun perempuan)	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan lulusan SMP ke atas	v	v	v	v	v	v	
			Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan kebutuhan kerja bagi laki-laki dan perempuan	Dinsos Disnaker	Meningkatnya kesempatan kerja bagi laki-laki dan perempuan lulusan SMA ke atas	v	v	v	v	v	v	v
			Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Dinsos Disnaker	Meningkatnya keterampilan pencari kerja laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan kerja	v	v	v	v	v	v	v
4.	Ekonomi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Pelatihan manajemen koperasi bagi pengurus dan kader koperasi laki-laki dan perempuan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya keterampilan manajemen koperasi bagi pengurus dan kader koperasi laki-laki dan perempuan	v	v	v	v	v	v	
			Pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi laki-laki dan perempuan	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya keterampilan wirausahaan bagi anggota koperasi laki-laki dan perempuan	v	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Pengusaha UMKM (laki-laki dan perempuan) Dalam Penyusunan Kelayakan Usaha	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya Kemampuan Pengusaha UMKM (laki-laki dan perempuan) Dalam Penyusunan Kelayakan Usaha	v	v	v	v	v	v
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha	Fasilitasi Akses Permodalan UMKM (pengusaha laki-laki dan perempuan)	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya pemahaman dan akses permodalan bagi pengusaha UMKM (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Sosialisasi dan pengawasan jajanan sekolah bagi pedagang (laki-laki dan perempuan)	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatnya pemahaman pedagang (laki-laki dan perempuan) tentang keamanan jajanan sekolah	v	v	v	v	v	v
		Program Peningkatan ketahanan pangan, pertanian dan peternakan.	Pemanfaatan perkarangan masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk pengembangan pangan	Dinas Pertanian	Meningkatnya jumlah keluarga (laki-laki dan perempuan) yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk pangan	v	v	v	v	v	v
			Pemanfaatan kebun sekolah untuk siswa (laki-laki dan perempuan) belajar produksi pangan	DKP3	Meningkatnya jumlah siswa (laki-laki dan perempuan) yang memanfaatkan kebun sekolah untuk belajar produksi pangan	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan rumahtangga sangat miskin (laki-laki dan perempuan) di lokasi PKH	DKP3	Meningkatnya jumlah rumahtangga miskin (laki-laki dan perempuan) yang berusaha di bidang pertanian	v	v	v	v	v	v
		Program pengembangan budidaya perikanan dan peternakan	Pengembangan usaha pertanian bagi anggota PKK (laki-laki dan perempuan) melalui pemberian bibit unggul buah dan sayuran	DKP3	Meningkatnya jumlah usaha ternak unggas dengan bibit unggul bagi anggota PKK (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
			Pengembangan usaha perikanan bagi anggota PKK (laki-laki dan perempuan) melalui pemberian bibit unggul ikan	DKP3	Meningkatnya jumlah usaha perikanan dengan bibit unggul bagi anggota PKK (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
			Pemberdayaan rumahtangga sangat miskin (laki-laki dan perempuan) di lokasi PKH melalui pemberian bibit unggul buah dan sayuran	DKP3	Meningkatnya jumlah rumahtangga sangat miskin (laki-laki dan perempuan) yang memiliki jiwa bercocok tanam	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan rumahtangga sangat miskin (laki-laki dan perempuan) di lokasi PKH melalui pemberian bibit unggul ikan	DKP3	Meningkatnya jumlah rumahtangga sangat miskin (laki-laki dan perempuan) yang memiliki usaha perikanan	v	v	v	v	v	v
		Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Bimtek pengelolaan keuangan dengan SIPKD	BPKD	Meningkatnya kemampuan pengelola keuangan SKPD (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
5	Sosial	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan	Dinsos	Meningkatnya kemampuan sosial dan keterampilan kerja bagi penyandang cacat laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan	v	v	v	v	v	v
			Bimbingan sosial dan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar (laki-laki dan perempuan)	Dinsos	Meningkatnya kemampuan sosial dan bakat serta keterampilan anak terlantar (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah sosial lainnya	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berusaha bagi kepala keluarga miskin (laki-laki dan perempuan)	Dinsos	Meningkatnya kemampuan sosial dan keterampilan usaha bagi kepala keluarga miskin (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v

pendampingan....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan pengelolaan usaha bagi kepala keluarga miskin (laki-laki dan perempuan)	Dinsos	Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha bagi kepala keluarga miskin (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v
			Bimbingan sosial dan pendampingan bagi peserta program keluarga (laki-laki dan perempuan) harapan sesuai kebutuhan	Dinsos	Meningkatnya kemampuan sosial peserta program keluarga (laki-laki dan perempuan) harapan sesuai kebutuhan	v	v	v	v	v	v
6.	Politik dan Pengambilan Keputusan	Program pendidikan politik masyarakat	Pengembangan kerjasama dengan partai politik untuk mengalokasikan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif minimal (30%)	Kantor Kesbangpol	Meningkatnya jumlah keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif	v	v			v	v
			Koordinasi forum diskusi dan semiloka/diseminasi politik bagi perempuan	Kantor Kesbangpol	Meningkatnya jumlah keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif	v	v			v	v
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kantor Kesbangpol	Meningkatkan kualitas pengasuhan dan pemberdayaan keluarga	v	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, tugas dan fungsi bagi PNS (laki-laki dan perempuan)	BKPSDM	Meningkatnya jenjang karir dan kapasitas sumberdaya manusia bagi PNS (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v			
7.	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan	Sosialisasi perlindungan terhadap kekerasan dan seksual pada remaja (laki-laki dan perempuan)	DINAS DAL DUK KB P3A PM	Meningkatnya pemahaman remaja tentang kekerasan dan trafficking pada remaja (laki-laki dan perempuan)	v	v	v	v	v	v	
			Penyusunan SPM penanganan korban pelecehan seksual dan kekerasan (laki-laki dan perempuan)	DINAS DAL DUK KB P3A PM	Dokumen pedoman teknis pencegahan dan penanganan korban trafficking dan kekerasan (bagi laki-laki dan perempuan)				v			v
		Program penguatan kelembagaan	Pelatihan bagi pengurus P2TP2A dan kader (laki-laki dan perempuan) tentang pelayanan dan pendampingan bagi korban trafficking dan kekerasan	DINAS DAL DUK KB P3A PM	Meningkatnya keterampilan bagi pengurus P2TP2A dan kader (laki-laki dan perempuan) tentang pelayanan dan pendampingan bagi korban trafficking dan kekerasan	v	v	v	v	v	v	v
		Program penanganan rujukan kegawatdaruratan korban kekerasan perempuan dan anak	Pelayanan rujukan korban kekerasan perempuan dan anak	RSUD Puskesmas	Meningkatnya jumlah rujukan bagi korban kekerasan perempuan dan anak	v	v	v	v	v	v	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan visum korban kekerasan perempuan dan anak	RSUD Puskesmas	Meningkatnya jumlah visum bagi korban kekerasan perempuan dan anak	v	v	v	v	v	v
8.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	Pelayanan publik dalam bidang administrasi kelahiran di tingkat kelurahan bagi keluarga non akta nikah	Disdukcapil	Meningkatnya jumlah anak (laki-laki dan perempuan) dari keluarga non akta nikah yang memiliki akta kelahiran	v	v	v	v	v	v
9.	Infrastruktur dasar	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan edukasi dan komunikasi masyarakat (laki-laki dan perempuan) di bidang lingkungan melalui fasilitasi dan pembinaan peran serta masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam menciptakan kampung ramah lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemahaman dan peran serta masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam menciptakan kampung ramah lingkungan	v	v	v	v	v	v
		Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelatihan kader satgas lingkungan (laki-laki dan perempuan) dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan kader satgas lingkungan (laki-laki dan perempuan) dalam pengendalian lingkungan hidup	v	v	v			v

		Peningkatan Infrastruktur kelurahan	Rehabilitasi Rumah Warga (laki-laki dan perempuan) Tidak Layak Huni di kelurahan	Dinas PU Tata Bangunan dan Pemukiman	Meningkatnya jumlah warga kelurahan (laki-laki dan perempuan) yang memiliki rumah layak huni	v	v	v			v
		Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya peran serta masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam pengelolaan persampahan	v	v	v			v

Sukabumi, 14 November 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI